

HUKUM

70/91

KITAB KENDANG
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK No. 006 /PP-UA/SPP-10/1990

FUNGSI DAN PERANAN BP₇ DALAM MEMASYARAKATAN P₄
DI SUMATERA BARAT

Oleh : Fauzi, SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila adalah merupakan sarana untuk mewujudkan kesatuan bahasa, kesatuan - pandangan, dan kesatuan gerak langkah bagi bangsa Indonesia dalam usaha menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan itu, untuk pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila terutama perlu sekali diusahakan melalui Lembaga dan kegiatan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga proses penghayatan dan pengamalan Pancasila tersebut dapat menumbuhkan keyakinan yang mendalam akan kebenaran dan kemampuan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Agar pelaksanaan pendidikan tersebut dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dan mampu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, serta dapat menumbuhkan karsa guna untuk dapat mengamalkan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa Indonesia, maka perlu diusahakan adanya pembinaan pendidikan pelaksanaan P4 secara teratur, terarah dan terus menerus berdasarkan kebijaksanaan, program kerja serta metode yang setepat-tepatnya.

Untuk terwujudnya lembaga pendidikan itu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 1979, dibentuklah sebuah Badan dalam lingkungan pemerintahan yang secara khusus bertugas melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden tersebut keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 239 tahun 1979.

Selanjutnya untuk dan dalam rangka pelaksanaan SK Menteri Dalam Negeri tersebut untuk daerah tingkat I Sumatera Barat dibentuklah suatu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7) Daerah tingkat I Sumatera Barat dengan berdasarkan surat -

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dikemukakan hasil yang diperoleh dari Penelitian yang dilakukan, untuk dibahas dan dianalisis lebih lanjut, disamping itu juga merupakan hasil dan pandangan Peneliti mengenai masalah yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor BP 7 tingkat I Sumatera Barat, peneliti telah menemukan data-data mengenai fungsi dan peranan BP 7 tingkat I Sumatera Barat dalam memasyarakatkan P4 di Sumatera Barat, sebagaimana yang telah digariskan dalam SK Presiden RI NO 10 tahun 1979, SK Menteri Dalam Negeri NO 239 tahun 1979 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor-B.18/Sospol/Kep/IX/1981.

Sasaran BP 7 sebagai pelaksana penataran dengan tujuan untuk memasyarakatkan P4 bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa kecuali walaupun Warga Negara itu berada dalam wadah :

1. Pegawai Negeri Republik Indonesia
2. Kelompok Masyarakat yang hidup dalam Lingkungan-RT/RW Desa/ Kelurahan ataupun Kota.
3. Kelompok Masyarakat yang hidup dalam Organisasi - Organisasi Pemuda
4. Kelompok Masyarakat yang hidup dalam Organisasi - Profesi
5. Kelompok masyarakat yang hidup dalam organisasi sosial.
6. Kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan - sosial
7. Kelompok Masyarakat dilingkungan Keagamaan
8. Kelompok Masyarakat dilingkungan Kebudayaan dan
9. Kelompok masyarakat Warga Negara RI yang berada di Luar Negeri.

Jadi dengan demikian, yang menjadi sasaran pemasyarakatan P4 bukanlah kelompok tertentu saja, organisasi ter -

BAB VI

P E N U T U P

Pada bab ini Peneliti akan mengemukakan kesimpulan - dari penelitian yang dilakukan pada kantor BP 7 tingkat I Sumatera Barat, dan disamping itu juga saran dari Peneliti Adapun kesimpulan yang yang dimaksud adalah :

1. BP 7 adalah suatu Lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Presiden RI nomor 10 tahun 1979, yang bertugas untuk melaksanakan Pembinaan Pendidikan Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila dikalangan anggota masyarakat dan Lingkungan Pemerintahan.
2. BP 7 tingkat I Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat Nomor B.18/Sospol/Kep/IX/1981 yang dilantik dan diresmikan pada tanggal 4 November 1981 dan merupakan Badan staf yang langsung berada - dibawah dan bertanggung jawab pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan P4 di daerah Sumatera Barat.
3. BP 7 tingkat I Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya telah memasyarakatkan dan membudayakan P4 melalui penataran sesuai dengan petunjuk dari BP 7 Pusat, seperti penataran type A, B dan C. Disamping itu juga telah melaksanakan penataran Pola 120 jam untuk calon Penatar, pola pendukung 100 jam 45 jam, 25 jam dan 17 jam, dan non penataran seperti permainan simulasi P4, cerdas tangkas P4, Media-massa, KPB 36 dan lain-lain.
4. Sasaran pemasyarakatan dan pembudayaan P4 adalah seluruh lapisan masyarakat baik Pegawai Negeri, Lembaga Pemerintah, Organisasi Politik dan organisasi kemasyarakatan yang sejak pelaksanaan tugasnya dari tahun 1981 s/d Februari 1990, jumlah anggota masyarakat Sumatera Barat yang telah dijangkau P4 adalah sebanyak 2.357.753 Orang. (terlampir)

5. Secara kuantitatif, BP 7 tingkat I Sumatera Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk pemasyarakatan P4. Dari Data yang ada, ternyata masih ada sebahagian Warga Sumatera Barat yang belum dijangkau P4 seperti daerah pedalaman dan terisolir. Disamping itu juga, dari data yang ada, ternyata masih banyak Pegawai Negeri di Sumatera Barat yang belum ditatar P4.
6. Kelom pencapir, sambung rasa, bulan bakti LKMD, Manunggal sakato sejati dan kelompok Basa wisma di - desa-desa, dapat dinilai sebagai usaha yang positif dalam memasyarakatkan P4. Dan KPH 36 ternyata sangat cocok untuk memasyarakatkan dan membudayakan P4 bagi Siswa SMTA.
7. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberikan keyakinan pada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan akan tercapai jika didasarkan pada keselarasan dan keseimbangan
8. Sebelum memasuki Pelita V, pemasyarakatan P4 telah berjalan dengan baik dan lancar, maka pada pelita V diharapkan untuk lebih ditingkatkan menjadi pembudayaan. Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh manusia Indonesia, akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
9. Dengan menerapkan ke 36 butir P4 itu dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dapat membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan Pancasila.
10. Dilihat dari pelaksanaan tugas BP 7 tingkat I Sumatera Barat, telah banyak membawa pengaruh yang sangat berarti bagi anggota masyarakat Sumatera Barat dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana masyarakat Sumatera Barat yang sangat terkenal dengan - adat basandi serak, serak basandi Kitabullah.
11. Pemasyarakatan dan pembudayaan P4 di daerah ting -

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Kansil, CST, Drs, SH. Pancasila dan UUD 1945, Paramita Jakarta 1979.
2. Syahar, Saidus, H, Drs, SH, Pancasila sebagai paham Kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, penerbit Alumni Bandung 1977
3. Abdul Gani, Ruslan, H, DR. Pengembangan Pancasila di Indonesia, Penerbit Press Jakarta 1977
4. Notonagoro, Prof, Drs, Mr. Pancasila secara ilmiah Populer Bina aksara, Jakarta, 1983
5. Anwar Junus, M, SH. Filsafat Negara Pancasila, Diktat kuliah.
6. Notonagoro, Prof, Drs, Mr. Beberapa hal mengenai falsafah Pancasila, Penerbit tujuh Jakarta 1972
7. BP 7 Pusat, Pola dasar Kebijakanaksanaan Pemasasyarakatan P4 1979
8. BP 7 tingkat I Sumatera Barat, KPB 36 Tuah Sakato Pancasila
9. BP 7 Tingkat I Sumatera Barat, Program kerja BP 7 1985/1986.
10. BP 7 Tingkat I Sumatera Barat, Laporan Tahunan, 1990